



Penerapan Praktik Akuntansi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Studi Literatur

Siti Ramadhani Saragih ^{1*}, Nurlaila ²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi Penulis: sitisaragih10@gmail.com

Abstract The Department of Industry and Trade (Disperindag) plays a crucial role in advancing the industrial and trade sectors at the local level. However, the implementation of accounting practices in government institutions often faces various significant and complex challenges. This literature study aims to present a comprehensive analysis of the application of accounting practices at the Department of Industry and Trade (Disperindag) by exploring various aspects of the accounting system implemented in the institution. This research employs a literature study method. In general, the accounting system applied at Disperindag has adhered to the applicable government accounting principles, including transaction recording, budget management, and reporting in accordance with established standards. However, there are several practices that need to be updated to align with the latest standards in order to enhance compliance. Although the financial reporting procedures are quite good, there are shortcomings in terms of speed and accuracy that can affect data-driven decisions. Budget management also faces challenges that require adjustments to enhance efficiency and effectiveness; recommendations for improving the accounting system at the Department of Industry and Trade are suggested. The increase in training for accounting staff is considered crucial to ensure they have a better understanding of regulations and best practices. In addition, updates in information technology are expected to accelerate and simplify the financial reporting process. A revision of the reporting and budget management procedures is also necessary to enhance the efficiency and effectiveness of budget utilization. The implementation of these recommendations is expected to improve the quality of the accounting system at the Department of Industry and Trade, enhance transparency and accountability, and support the achievement of the agency's strategic goals more effectively. Thus, financial management at the Department of Industry and Trade can become more optimal and contribute to sustainable economic development.

Keywords: Accounting; Reporting; Efficiency

Abstrak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) memegang peranan penting dalam memajukan sektor industri dan perdagangan di tingkat lokal. Namun, penerapan praktik akuntansi di lembaga pemerintahan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dan kompleks. Studi literatur ini bertujuan untuk menyajikan analisis komprehensif mengenai penerapan praktik akuntansi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dengan mengeksplorasi berbagai aspek sistem akuntansi yang diterapkan di lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Secara umum, sistem akuntansi yang diterapkan di Disperindag telah mengikuti prinsip-prinsip akuntansi pemerintah yang berlaku, meliputi pencatatan transaksi, manajemen anggaran, dan pelaporan sesuai standar yang ditetapkan. Namun, ada beberapa praktik yang perlu diperbarui untuk sesuai dengan standar terbaru demi meningkatkan kepatuhan. Meskipun prosedur pelaporan keuangan cukup baik, ada kekurangan dalam hal kecepatan dan akurasi yang dapat memengaruhi keputusan berbasis data. Pengelolaan anggaran juga menghadapi tantangan yang memerlukan penyesuaian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rekomendasi untuk perbaikan sistem akuntansi di Disperindag disarankan. Peningkatan pelatihan untuk staf akuntansi dianggap krusial untuk memastikan mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan dan praktik terbaik. Selain itu, pembaruan dalam teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses pelaporan keuangan. Revisi terhadap prosedur pelaporan dan pengelolaan anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Implementasi dari rekomendasi ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas sistem akuntansi di Disperindag, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung pencapaian tujuan strategis lembaga dengan lebih efektif. Dengan demikian, pengelolaan keuangan di Disperindag dapat menjadi lebih optimal dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata-kata Kunci: Akuntansi; Pelaporan; Efisiensi

1. PENDAHULUAN

Dalam kerangka perkembangan ekonomi yang terus menerus maju, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) memegang peranan penting dalam memajukan

sektor industri dan perdagangan di tingkat lokal. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan berbagai sektor ini, Disperindag diharapkan untuk menjalankan semua aktivitasnya dengan tingkat efisiensi dan transparansi yang tinggi. Untuk mencapai tujuan ini secara efektif, penerapan praktik akuntansi yang berkualitas menjadi salah satu elemen krusial (Ismail et al., 2021).

Praktik akuntansi yang efektif dan akurat merupakan fondasi penting bagi pengelolaan keuangan yang berkelanjutan di lembaga pemerintah, termasuk di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Akuntansi yang baik tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk pencatatan dan pelaporan keuangan yang tepat, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan secara optimal dan pengambilan keputusan didasarkan pada data yang akurat. Dalam hal ini, sistem akuntansi yang diterapkan harus mampu mendukung kepatuhan terhadap berbagai regulasi dan peraturan yang berlaku, mengelola anggaran dengan transparansi penuh, serta menyediakan laporan keuangan yang jelas dan terperinci. Dengan sistem yang efektif, Disperindag dapat mengelola anggaran secara efisien, menjaga akuntabilitas, dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Gultom & Perjalanan, 2024)

Keberhasilan penerapan praktik akuntansi yang baik memberikan dampak langsung pada pencapaian tujuan strategis lembaga. Akuntansi yang baik memfasilitasi audit yang efektif, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas publik, yang pada gilirannya mendukung pengembangan industri dan perdagangan lokal. Praktik ini juga mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih baik, memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih efektif. Dengan demikian, implementasi sistem akuntansi yang solid dan sesuai standar tidak hanya memastikan pengelolaan keuangan yang tepat tetapi juga berkontribusi pada manfaat maksimal bagi perkembangan sektor industri dan perdagangan di tingkat local (Riwukore et al., 2022).

Namun, penerapan praktik akuntansi di lembaga pemerintahan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dan kompleks. Salah satu tantangan utama adalah menghadapi kompleksitas peraturan dan regulasi yang harus dipatuhi. Lembaga pemerintah seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) harus mengikuti berbagai ketentuan hukum dan standar akuntansi yang seringkali rumit dan saling terkait. Ini memerlukan pemahaman mendalam dan keterampilan khusus untuk memastikan bahwa setiap aspek dari praktik akuntansi dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sementara pada saat yang sama menjaga keseimbangan antara transparansi dan efisiensi. Kebutuhan untuk memastikan transparansi penuh dalam pelaporan keuangan sering kali berbenturan dengan

kebutuhan untuk menjaga proses yang efisien dan tidak terlalu membebani sumber daya (Astuti et al., 2023).

Selain itu, seringkali terdapat keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan teknologi yang dapat mempengaruhi kualitas sistem akuntansi. Kurangnya tenaga ahli yang terlatih dalam bidang akuntansi dan pembatasan dalam penggunaan teknologi canggih dapat menyebabkan sistem akuntansi tidak berjalan dengan optimal, mempengaruhi akurasi pencatatan dan pelaporan keuangan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan implementasi sistem akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik lembaga serta pelatihan yang memadai bagi staf. Keberhasilan penerapan praktik akuntansi yang efektif dalam konteks lembaga pemerintahan sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi kendala-kendala ini dengan pendekatan yang terencana dan strategis, memastikan bahwa semua prosedur akuntansi dapat memenuhi standar yang tinggi sambil mendukung pencapaian tujuan strategis lembaga secara keseluruhan (Kamilah & Samri Juliati Nasution, 2024).

Studi literatur ini bertujuan untuk menyajikan analisis komprehensif mengenai penerapan praktik akuntansi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dengan mengeksplorasi berbagai aspek sistem akuntansi yang diterapkan di lembaga tersebut. Penelitian ini akan menyelidiki dan mengevaluasi sistem akuntansi yang ada secara mendalam, menilai keefektifan prosedur pelaporan keuangan, serta menganalisis bagaimana pengelolaan anggaran dilakukan dalam praktik sehari-hari. Kajian ini juga akan berfokus pada identifikasi dan analisis tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi sistem akuntansi di Disperindag, termasuk isu-isu yang mungkin menghambat efisiensi dan transparansi. Dalam proses ini, penelitian akan merujuk pada berbagai studi literatur sebelumnya, laporan keuangan yang relevan, serta pedoman akuntansi pemerintah yang berlaku untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang konteks dan praktik akuntansi yang diterapkan.

Selain itu, kajian ini akan memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana praktik akuntansi diterapkan dan dikelola, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kepatuhan terhadap peraturan, penggunaan teknologi, dan pelatihan sumber daya manusia. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini akan menawarkan rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem akuntansi yang ada di Disperindag. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem akuntansi, memperkuat transparansi dalam pelaporan keuangan, dan mendukung akuntabilitas publik, sehingga pengelolaan keuangan di lembaga tersebut dapat dilakukan dengan lebih optimal dan sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap

pengembangan praktik akuntansi yang lebih baik di lembaga pemerintah, khususnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Dengan analisis mendalam yang dilakukan dalam penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan serta rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan sistem akuntansi yang ada. Melalui perbaikan ini, pengelolaan keuangan di sektor industri dan perdagangan akan dapat ditingkatkan secara signifikan, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan strategis lembaga dengan lebih efektif. Selain itu, perbaikan dalam praktik akuntansi akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien, pelaporan yang lebih transparan, dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran.

Pendahuluan ini memberikan latar belakang yang mendalam mengenai pentingnya praktik akuntansi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan fokus pada bagaimana praktik tersebut mempengaruhi pengelolaan keuangan dan pencapaian tujuan lembaga. Selain itu, pendahuluan ini juga menjelaskan secara rinci tujuan dan ruang lingkup dari studi literatur yang akan dilakukan, menguraikan bagaimana penelitian ini akan mengkaji berbagai aspek sistem akuntansi yang diterapkan, serta merinci metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas praktik akuntansi dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Dengan memahami konteks dan ruang lingkup studi ini, diharapkan bahwa hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan rekomendasi praktis untuk meningkatkan sistem akuntansi di Disperindag serta mendukung tujuan strategis lembaga dalam rangka memperkuat sektor industri dan perdagangan.

2. LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam studi ini berfokus pada penerapan praktik akuntansi di lembaga pemerintah, khususnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Pembahasan ini mencakup konsep dasar akuntansi, prinsip-prinsip akuntansi pemerintah, serta tantangan yang sering dihadapi dalam implementasi sistem akuntansi di sektor publik.

Konsep Dasar Akuntansi

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan untuk menyediakan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Akuntansi berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan melaporkan informasi keuangan yang penting bagi manajer dan pihak-pihak berkepentingan. Dalam konteks lembaga pemerintah, akuntansi harus mencakup kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku, seperti diuraikan oleh Smith dan Brown (2020), yang menekankan pentingnya sistem akuntansi yang akurat dan

transparan di sektor public (Wardani & Wardana, 2022).

Prinsip-Prinsip Akuntansi Pemerintah

Dalam sektor publik, termasuk di Disperindag, prinsip-prinsip akuntansi pemerintah sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini meliputi akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh badan-badan pengatur (Resmadiktia et al., 2023). Akuntansi pemerintah di Indonesia berfokus pada pelaporan yang akurat mengenai penggunaan anggaran dan hasil dari kegiatan yang dilakukan, dengan tujuan mendukung pengelolaan keuangan yang efektif (Vitriana et al., 2022).

Tantangan dalam Implementasi Akuntansi di Sektor Publik

Implementasi sistem akuntansi di sektor publik sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk kompleksitas peraturan dan kebutuhan untuk menyeimbangkan transparansi dengan efisiensi. Tantangan utama dalam sektor publik termasuk kepatuhan terhadap peraturan yang kompleks dan kebutuhan untuk sistem yang efisien. Selain itu, keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan teknologi juga mempengaruhi kualitas sistem akuntansi (Alabdullah et al., 2019). Kurangnya pelatihan bagi staf dan perangkat teknologi yang tidak memadai dapat menghambat efektivitas sistem akuntansi serta mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan (Hidayati et al., 2023)

Studi Terkait

Studi terbaru menunjukkan bahwa penerapan praktik akuntansi yang baik di lembaga pemerintah dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan akuntabilitas publik. Misalnya, penelitian oleh Rahrjo dan Alimuddin (2022) mengungkapkan bahwa integrasi teknologi informasi dalam sistem akuntansi pemerintah dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi pelaporan keuangan. Selain itu, penelitian oleh Wulandari et al. (2023) menunjukkan bahwa peningkatan pelatihan akuntansi dan penerapan sistem teknologi informasi yang lebih baik dapat memperbaiki transparansi dan akuntabilitas di lembaga pemerintah.

Kesimpulan Literature Review

Literature review ini menggarisbawahi pentingnya penerapan praktik akuntansi yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan di lembaga publik seperti Disperindag. Studi ini akan mengkaji bagaimana sistem akuntansi yang ada di Disperindag dapat ditingkatkan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang dapat mendukung pencapaian tujuan strategis lembaga dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas publik.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis penerapan praktik akuntansi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistem akuntansi yang diterapkan di lembaga tersebut dengan merujuk pada berbagai sumber literatur yang relevan. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan memilih sumber literatur yang relevan. Sumber-sumber yang akan digunakan meliputi buku teks dan jurnal akademik terbaru yang membahas prinsip-prinsip akuntansi pemerintah, praktik terbaik dalam akuntansi sektor publik, serta studi kasus yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengakses database akademik dan perpustakaan digital untuk mendapatkan artikel, buku, dan publikasi terkait. Selain itu, laporan keuangan dan dokumen administrasi dari Disperindag akan dikumpulkan, baik yang tersedia secara online maupun melalui permintaan resmi. Dokumen kebijakan dan pedoman akuntansi yang berlaku untuk sektor publik juga akan disusun sebagai bagian dari data yang dikumpulkan. Analisis literatur dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang mencakup evaluasi dan perbandingan berbagai aspek dari praktik akuntansi di Disperindag. Analisis ini akan mencakup kajian terhadap prinsip-prinsip akuntansi pemerintah dan penerapannya dalam sistem akuntansi Disperindag, penilaian keefektifan prosedur pelaporan keuangan dan pengelolaan anggaran, serta identifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi praktik akuntansi, seperti kepatuhan terhadap regulasi dan keterbatasan sumber daya. Temuan dari analisis literatur akan disintesis untuk memberikan wawasan mendalam mengenai praktik akuntansi yang diterapkan di Disperindag. Berdasarkan sintesis tersebut, rekomendasi akan disusun untuk memperbaiki sistem akuntansi yang ada, dengan tujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di lembaga tersebut (Adlini et al., 2022).

4. HASIL PENELITIAN

Temuan dari penelitian ini memberikan pemahaman utama mengenai penerapan praktik akuntansi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), berdasarkan analisis literatur yang dilakukan. Temuan ini meliputi penilaian terhadap sistem akuntansi yang ada, evaluasi prosedur pelaporan keuangan dan pengelolaan anggaran, serta identifikasi tantangan utama dalam implementasinya.

1. Evaluasi Sistem Akuntansi yang Diterapkan

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem akuntansi di Disperindag umumnya mengikuti prinsip-prinsip akuntansi pemerintah yang berlaku. Sistem ini mencakup pencatatan

transaksi, manajemen anggaran, dan pelaporan sesuai dengan standar yang ada. Meskipun demikian, beberapa praktik perlu disesuaikan untuk lebih sesuai dengan standar terbaru (Nuryani & Hartati, 2022). Secara keseluruhan, sistem akuntansi mendukung transparansi dan akuntabilitas, tetapi masih terdapat area yang memerlukan perbaikan untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan.

2. Penilaian Prosedur Pelaporan Keuangan dan Pengelolaan Anggaran

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur pelaporan keuangan di Disperindag cukup memadai, ada beberapa kekurangan terkait kecepatan dan akurasi pelaporan. Beberapa laporan keuangan menunjukkan adanya keterlambatan yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan berbasis data (Ahmed et al., 2019). Pengelolaan anggaran juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal alokasi dan pemantauan, yang memerlukan penyesuaian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran (Putra & Susanto, 2021).

3. Tantangan dalam Implementasi Praktik Akuntansi

Implementasi praktik akuntansi di Disperindag menghadapi beberapa tantangan utama, termasuk kompleksitas peraturan dan keterbatasan sumber daya manusia serta teknologi. Penelitian ini menemukan bahwa peraturan yang berlaku sering kali rumit dan memerlukan pemahaman mendalam, yang dapat menghambat proses akuntansi dan pelaporan (Khan & Hildreth, 2021). Selain itu, kurangnya pelatihan untuk staf dan teknologi yang tersedia juga berdampak pada kualitas sistem akuntansi. Tantangan ini sering kali mengakibatkan ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan dan manajemen anggaran (Raharjo & Alimuddin, 2022).

4. Rekomendasi untuk Perbaikan Berdasarkan hasil temuan,

Disarankan beberapa langkah perbaikan untuk sistem akuntansi di Disperindag. Pertama, peningkatan pelatihan untuk staf akuntansi diperlukan agar mereka lebih memahami peraturan dan praktik terbaik. Kedua, perlu ada peningkatan dalam teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah proses pelaporan keuangan. Ketiga, revisi terhadap prosedur pelaporan dan pengelolaan anggaran disarankan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas sistem akuntansi di Disperindag dapat meningkat, serta mendukung pencapaian tujuan strategis lembaga secara keseluruhan.

Secara umum, sistem akuntansi yang diterapkan di Disperindag telah mengikuti prinsip-prinsip akuntansi pemerintah yang berlaku, meliputi pencatatan transaksi, manajemen anggaran, dan pelaporan sesuai standar yang ditetapkan. Namun, ada beberapa praktik

yang perlu diperbarui untuk sesuai dengan standar terbaru demi meningkatkan kepatuhan. Meskipun prosedur pelaporan keuangan cukup baik, ada kekurangan dalam hal kecepatan dan akurasi yang dapat memengaruhi keputusan berbasis data. Pengelolaan anggaran juga menghadapi tantangan yang memerlukan penyesuaian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Implementasi praktik akuntansi di Disperindag menghadapi beberapa kendala utama, seperti kompleksitas peraturan yang seringkali rumit dan keterbatasan dalam sumber daya manusia serta teknologi, yang dapat menghambat proses akuntansi dan pelaporan. Untuk mengatasi isu-isu ini, disarankan beberapa langkah perbaikan, termasuk peningkatan pelatihan bagi staf akuntansi untuk memahami peraturan dan praktik terbaik dengan lebih baik, peningkatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah proses pelaporan, serta revisi prosedur pelaporan dan pengelolaan anggaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas sistem akuntansi di Disperindag, serta mendukung pencapaian tujuan strategis lembaga secara keseluruhan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan praktik akuntansi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melalui kajian literatur yang mendalam. Temuan dari studi ini mengungkap bahwa sistem akuntansi yang diterapkan di Disperindag umumnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah yang berlaku. Sistem tersebut mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Namun, analisis juga menunjukkan adanya beberapa aspek yang memerlukan perbaikan, terutama terkait dengan penyesuaian praktik akuntansi terhadap standar yang lebih baru serta peningkatan kecepatan dan ketepatan pelaporan keuangan.

Prosedur pelaporan keuangan di Disperindag, meskipun sudah memadai, masih menunjukkan beberapa kekurangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dalam pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, pengelolaan anggaran di Disperindag menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam hal alokasi dan pemantauan anggaran. Tantangan ini memerlukan penyesuaian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, agar pengelolaan keuangan dapat lebih optimal.

Tantangan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini mencakup kompleksitas peraturan yang harus dipatuhi serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang ada. Kesulitan dalam memahami dan menerapkan peraturan yang rumit dapat menghambat proses akuntansi dan pelaporan, sementara keterbatasan dalam pelatihan untuk staf serta teknologi

yang tidak memadai berdampak pada kualitas sistem akuntansi. Tantangan-tantangan ini sering kali mengakibatkan ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan anggaran.

Berdasarkan hasil temuan, beberapa rekomendasi untuk perbaikan sistem akuntansi di Disperindag disarankan. Peningkatan pelatihan untuk staf akuntansi dianggap krusial untuk memastikan mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan dan praktik terbaik. Selain itu, pembaruan dalam teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses pelaporan keuangan. Revisi terhadap prosedur pelaporan dan pengelolaan anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Implementasi dari rekomendasi ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas sistem akuntansi di Disperindag, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung pencapaian tujuan strategis lembaga dengan lebih efektif. Dengan demikian, pengelolaan keuangan di Disperindag dapat menjadi lebih optimal dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

6. DAFTAR REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Alabdullah, T. T. Y., Ahmed, E. R., & Muneerali, M. (2019). Effect of board size and duality on corporate social responsibility: What has improved in corporate governance in Asia? *Journal of Accounting Science*, 3(2), 121–135. <https://doi.org/10.21070/jas.v3i2.2810>
- Astuti, I. I., Sulisman, A. N., & Tarigan, S. R. D. B. (2023). Eksplorasi e-governance: Menjawab tantangan implementasi e-commerce era VUCA di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh*, 13(2). <https://doi.org/10.37598/jimma.v13i2.1865>
- Gultom, & Perjalanan. (2024). Optimalisasi beban administratif: Pendekatan komprehensif prosedur dan perampingan strategi pengelolaan badan dinas perindustrian dan perdagangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(1), 24–28. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/view/23921>
- Hidayati, H., Asnathur Aisyah, P., Elva Dona, Romi Susanto, & Yosep Eka Putra. (2023). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun (2017–2021). *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 9(2), 326–338. <https://doi.org/10.38204/jrak.v9i2.1306>
- Ismail, Y. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2021). Evaluasi penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) No.5 tentang akuntansi persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(3), 248–257.

- Kamilah, K., & Nasution, Y. S. J. (2024). The optimization of digitalization in facing global competition: The case of Islamic accounting. *Qubahan Academic Journal*, 4(2), 14–22. <https://doi.org/10.48161/qaj.v4n2a232>
- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y. D., & Aiman, L. M. (2023). Pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan good governance sesuai hukum administrasi negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685–697.
- Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini, T. (2022). Good governance dalam mengukur kinerja lembaga negara (review). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1974>
- Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>
- Wardani, F. K., & Wardana, B. E. (2022). Prinsip dasar dan konsep dasar akuntansi. *Asian Journal of Management Analytics*, 1(2), 125–136. <https://doi.org/10.55927/ajma.v1i2.1485>